

Strategi Penanganan Orang Terlantar Miskin Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Surakarta

Cornelius Brilian Boni Nugraha^{1*}, Triana Rejekiningsih²

^{1,2} Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

*Korespondensi: corneliusbrilian@student.uns.ac.id

Abstract. *The problem of poverty and neglect in Indonesia is still a major challenge, especially in big cities like Surakarta. The Surakarta City Social Service has the responsibility to handle the problems of neglected people so that they get proper social welfare rights. This study aims to analyze the strategies for handling neglected people implemented by the Surakarta City Social Service, especially in the Social Rehabilitation Sub-Division. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through interviews with Social Service employees and observations of the social rehabilitation services provided. The results of the study showed that the strategies used included data collection, provision of shelters, provision of health and social services, and reintegration into society. Although this strategy is quite effective, there are several obstacles such as budget constraints and lack of public awareness. Therefore, synergy is needed between the government*

Keywords: *Handling Strategy, Displaced People, Social Welfare, Social Services, Surakarta*

Abstrak. Masalah kemiskinan dan keterlantaran di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama di kota-kota besar seperti Surakarta. Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki tanggung jawab dalam menangani permasalahan orang terlantar agar mereka mendapatkan hak kesejahteraan sosial yang layak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan orang terlantar yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta, khususnya di Sub Bagian Rehabilitasi Sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Sosial dan observasi terhadap layanan rehabilitasi sosial yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan mencakup pendataan, penyediaan rumah singgah, pemberian layanan kesehatan dan sosial, serta reintegrasi ke masyarakat. Meskipun strategi ini cukup efektif, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi sosial bagi orang terlantar.

Kata kunci: Strategi Penanganan, Orang Terlantar, Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial, Surakarta

1. LATAR BELAKANG

Masalah orang terlantar di Indonesia merupakan isu sosial yang kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang atau sekitar 9,22% dari total populasi. Kota Surakarta juga menghadapi permasalahan ini, dengan banyaknya individu yang kehilangan tempat tinggal dan tidak memiliki sumber penghidupan yang layak. Kemiskinan yang tidak tertangani dapat berdampak pada peningkatan jumlah orang terlantar, gelandangan, dan pengemis di perkotaan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara." Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan sosial bagi mereka yang

membutuhkan. Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki peran penting dalam menangani permasalahan ini melalui berbagai strategi rehabilitasi sosial.

Strategi yang diterapkan mencakup pendataan, penyediaan tempat penampungan sementara, layanan kesehatan, pemberian pelatihan kerja, hingga reintegrasi sosial bagi individu yang telah mendapatkan rehabilitasi. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia yang terbatas, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran mereka dalam membantu orang terlantar kembali ke kehidupan yang lebih baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta dalam menangani orang terlantar. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendorong serta penghambat efektivitas strategi tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Orang terlantar merupakan individu yang tidak mempunyai kemampuan dalam mencukupi keperluan hidupnya secara mendasar misalnya pangan, sandang dan papan. kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan sosial, kehilangan keluarga atau kerabat yang dapat memberikan dukungan, serta kondisi fisik atau mental yang menghambat mereka untuk mandiri. Selain itu, faktor seperti bencana alam, konflik sosial, dan ketidakmampuan ekonomi juga dapat menyebabkan seseorang menjadi terlantar. (Rizky D. Putro, 2015: 24). Adanya orang terlantar maka perlu penanganan agar tidak menjadi sebuah masalah yang besar bagi individu dan memastikan adanya jaminan dan perlindungan sosial bagi warga negara Indonesia maka perlu segera ditangani dengan beberapa strategi. Strategi dimaknai menjadi suatu rencana ataupun keinginan yang mendahului ataupun mengarahkan aktivitas dengan pendapat lainnya juga menambahkan strategi adalah perencanaan pola yang ditentukan secara sengaja dalam rangka melaksanakan suatu aktivitas ataupun tindakan. Dalam keadaan ini, setiap individu merasakan rasa aman, memiliki moralitas yang baik, serta hidup dalam ketentraman lahir dan batin. Konsep kesejahteraan sosial ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, baik yang bersifat jasmani, rohani, maupun sosial. Konsep negara kesejahteraan merujuk pada tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh warganya melalui pemenuhan kebutuhan dasar, baik material, sosial, maupun spiritual. John Maynard Keynes dan Marshall memberikan pandangan tentang pentingnya peran aktif negara dalam menciptakan kesejahteraan melalui kebijakan ekonomi dan pemberian hak sosial.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai strategi penanganan orang terlantar di Kota Surakarta. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Dinas Sosial, pekerja sosial di Rumah Singgah Gajah Mada, serta individu yang pernah mengalami kondisi keterlantaran. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap layanan yang diberikan di rumah singgah serta dokumentasi kebijakan pemerintah terkait rehabilitasi sosial.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari berbagai narasumber untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Hardy, Langley, dan Rose, strategi dipahami sebagai suatu rencana atau kehendak yang mendahului serta mengendalikan kegiatan. Pendapat lain menyatakan bahwa strategi merupakan pola yang dirancang secara sengaja untuk melaksanakan tindakan tertentu. Strategi yang efektif memiliki empat unsur utama:

1. Tujuan yang jelas dan berjangka panjang, sehingga strategi digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
2. Pemahaman mendalam terhadap lingkungan eksternal, yang memungkinkan organisasi beradaptasi dengan perubahan dan tantangan yang ada.
3. Pemahaman terhadap kemampuan internal, baik dalam lingkup organisasi maupun individu, guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
4. Pelaksanaan yang efektif, mencakup koordinasi, resolusi, serta pemanfaatan optimal terhadap kapasitas dan komitmen semua anggota organisasi.

Pengertian ini sejalan dengan Teori Basic Needs yang dikemukakan oleh Gunnar Myrdal, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelompok miskin. Kebutuhan tersebut mencakup sandang, pangan, papan, perumahan, serta akses terhadap layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi.

Strategi Penanganan Orang Terlantar dalam keadaan miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Surakarta

Pelayanan penanganan orang terlantar di Kota Surakarta diawali dari masyarakat yang melaporkan adanya orang terlantar yang mengganggu ketertiban umum, tidak hanya dari masyarakat, linmas ataupun Satpol PP juga dapat merazia orang terlantar yang kemudian orang terlantar dibawa ke Rumah Singgah menurut kondisi dari observasi awal, jika orang tersebut sakit maka langsung di bawa kepada layanan kesehatan contohnya puskesmas, kebanyakan yang ditemui adalah orang dalam gangguan jiwa yang mengganggu aktifitas masyarakat dan perlu adaya razia untuk diamankan, setelah diamankan orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ langsung dibawa ke RSJ untuk diobati serta di assesmen awal untuk mendapatkan data orang tersebut dan menentukan langkah selanjutnta. Jika orang terlantar tersebut sehat dan hanya tidak memiliki pangan atau papan saja maka langsung di assemen awal dan diberikan penanganan sesuai apa yang dibutuhkan, dan dihubungi keluarganya untuk bisa dijemput ataupun diantarkan oleh Dinas Sosial.

Rumah singgah yang ada menjadi sebuah solusi awal yang dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Upaya pemberdayaan terhadap orang terlantar harus berfokus pada pengembangan kemampuan mereka untuk hidup mandiri. Pendekatan yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pembukaan akses terhadap lapangan kerja, dan pemberian modal usaha dapat memberikan solusi jangka panjang. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan peran masyarakat dalam mendukung mereka juga penting untuk memastikan integrasi sosial dan keberlanjutan hasil intervensi.

Faktor pendorong dan penghambat strategi penanganan orang terlantar dalam keadaan miskin di Surakarta

Faktor pendukung merupakan suatu hal yang dapat memberikan dorongan untuk mencapai tujuan serta supaya tujuan tersebut dapat tepat sasaran dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial bagi orang terlantar, Faktor pendukung utama dalam penanganan orang terlantar adalah adanya kebijakan dan regulasi yang jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan hukum yang kuat untuk melindungi orang terlantar. Selain itu, Kerja sama yang erat antara instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat mempercepat penanganan. Sinergi ini mencakup pembagian peran, sumber daya, dan informasi untuk mendukung orang terlantar. Keterlibatan masyarakat

dalam memberikan bantuan, baik melalui sumbangan maupun dukungan moral, memainkan peran penting. Partisipasi ini menciptakan rasa solidaritas dan membantu mengurangi stigma terhadap orang terlantar. Perkembangan teknologi seperti sistem pendataan terpadu, dan program- program berbasis komunitas yang memberdayakan orang terlantar untuk mandiri, dapat meningkatkan keberhasilan penanganan. Inovasi ini membantu menciptakan solusi yang lebih berkelanjutan dan berdampak luas. keberadaan program sosial seperti rumah singgah, bantuan langsung tunai, dan pelatihan keterampilan memberikan akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang pemberdayaan. Dukungan masyarakat dan lembaga swadaya juga menjadi faktor pendukung signifikan, karena mereka sering kali berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan orang terlantar. Teknologi modern seperti sistem informasi berbasis digital juga membantu mempercepat pendataan dan distribusi bantuan.

Faktor penghambat merupakan suatu hal yang menjadi hambatan dari Dinas Sosial untuk melaksanakan tugas pokoknya dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial orang terlantar, faktor penghambat Dinas Sosial antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan Prasarana menjadi factor kendala dalam memberikan pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial karena tidak adanya transportasi ambulance di rumah singgah untuk mengantarkan PPKS yang menderita sakit.
2. Modal atau Dana Meskipun biaya pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial di peroleh melalui APBD dan APBN, tetapi tetap saja membutuhkan biaya yang sangat besar untuk mencapai tujuan tersebut secara maksimal.
3. Faktor dari latar belakang pendidikan dari para pegawai Dinas Sosial, dimana pegawai harus bisa menyesuaikan dengan situasi (menyesuaikan focus, lokus nya). Siapa yang dihadapinya, dimana lokasi yang dihadapi itu mempunyai pengaruh yang sangat besar, sehingga pegawai dinas sosial harus dapat pandai menyesuaikan diri dengan mereka.
4. Orang terlantar kerap dianggap sebagai beban masyarakat, sehingga mereka mengalami diskriminasi dan pengucilan. Hal ini menjadi hambatan bagi orang terlantar untuk dapat kembali bergabung di masyarakat, untuk itu perlu adanya pembinaan dan dukungan yang baik dari Dinas kepada masyarakat luas untuk dapat menerima kembali.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti di lapangan dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut.

Strategi Penanganan orang terlantar dalam keadaan miskin yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Surakarta diberikan secara langsung oleh Petugas Rumah Singgah Gajah mada yang merupakan bagian dari Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Surakarta, Penanganan yang dilakukan memiliki beberapa tahapan, mulai dari penjemputan ataupun penjaringan oleh Dinas Sosial ataupun oleh Masyarakat melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang kemudian diserahkan ke Dinas Sosial melalui Rumah Singgah Gajah mada, dan dilakukan assesmen awal untuk identifikasi orang terlantar, jika sehat akan diberikan kebutuhan dasar serta dihubungi keluarganya, namun jika tidak dalam keadaan sehat akan dibawa ke Instansi Kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Jika orang terlantar memiliki identitas yang jelas maka akan lebih cepat untuk dikembalikan, namun jika tidak ada identitas yang jelas maka butuh adanya assesmen lanjutan ataupun cek biometrik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor pendorong dan penghambat strategi penanganan orang terlantar dalam keadaan miskin di Surakarta dipengaruhi dari adanya faktor internal dari dinas sosial dan juga faktor internal dari orang terlantar itu sendiri, faktor pendorong yang dapat memperlancar strategi penanganan orang terlantar adalah adanya kebijakan yang mendasari dalam pelayanan yang diberikan, faktor pendorong lain adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah untuk menertibkan masyarakat yang belum mampu menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat, kemajuan teknologi juga membawa pada kemudahan akses untuk mengetahui data diri orang terlantar serta riwayatnya. Namun, terdapat faktor penghambat yang menjadikan strategi penanganan ini sulit untuk diterapkan, orang terlantar yang ditemukan dalam keadaan sakit belum bisa ditangani secara maksimal dikarenakan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganannya, membutuhkan biaya yang besar untuk menanganani orang terlantar dalam jumlah yang besar, mengingat masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, stigma negatif untuk para orang terlantar juga menjadi faktor penghambat untuk kembalinya orang terlantar ke dalam masyarakat. Bagi Dinas Sosial Surakarta, Dinas Sosial sebagai garda terdepan dalam penanganan orang terlantar melalui Rumah Singgah gajah mada yang menangani secara menyeluruh masalah sosial terutama pada penanganan orang terlantar harus mampu melihat adanya kondisi masyarakat khususnya di Kota Surakarta yang masih banyak orang terlantar yang sudah ditangani dan

kembali kejalan, sebaiknya dinas sosial mampu untuk memberikan motivasi dan pembinaan yang lebih baik agar dapat memberikan dampak yang baik juga bagi orang terlantar untuk menjalankan fungsi sosialnya. Bagi Masyarakat, Pembaca hendaknya menyadari adanya orang terlantar yang ada disekitar kita yang tentu bisa berasal dari keluarga kita sendiri, untuk itu perlu kita beri dukungan bagi masyarakat yang kurang mampu agar termotivasi untuk menjalankan kehidupannya dengan penuh tanggung jawab dan tidak hanya bergantung pada apa yang ada di jalanan.

DAFTAR REFERENSI

- Alvizar Dayusman, E., Alimudin, A., & Hidayat, T. (2023). Kemanusiaan dan kesejahteraan sosial dalam pemikiran Islam kontemporer. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 7(1). <https://doi.org/10.52266/tajdid.v7i1.1759>
- Apriani, A., Arfandi, A., Erista, V., Oktaviani, N. S., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2023). Masalah kesejahteraan sosial pada pengemis perempuan dan anak. *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, 2(1), 38–45. <http://proceedings.dokicti.org/index.php/CPBS/index>
- Caesar, M. R., & Listania, T. (2021). Implementasi kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. *Neo Politea*, 1(2). <https://doi.org/10.53675/neopolitea.v1i2.104>
- Dahlan, A., & 'Irfaan, S. (2014). Mengagas negara kesejahteraan. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.24090/ej.v2i1.2014.pp1-22>
- Hadiyono, V. (2020). Indonesia dalam menjawab konsep negara welfare state dan tantangannya. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, 1(1). <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2672>
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan sosial & kesejahteraan sosial: Sebuah pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Huda, M. (2012). *Ilmu kesejahteraan sosial* (Kasyadi, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Penerbit Samudra Biru.
- Indriyani, I., Sungkono, S., & Karnama, M. M. (2022). Penanganan gelandangan dan pengemis di Dinas Sosial Kabupaten Karawang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3368>
- Maryolinda, R. (2021). Strategi penanganan gelandang pengemis (GEPENG) di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(2), 51–61. <https://doi.org/10.52000/jsi.v1i2.24>
- Pendidikan, M., Persekolahan, K., & Kemasyarakatan, D. (2018). *Prosiding Seminar Nasional PPKn*. Seminar.
- Putra, M. D. (2021). Negara kesejahteraan (Welfare State) dalam perspektif Pancasila (Vol. 23, Issue 2).
- Rohmah, N. N. (2017). *Model penanganan bagi pengemis gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Banyumas* [Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Semarang].